



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
KESEHATAN**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG KESEHATAN**

**JAKARTA, 11 JULI 2023**

***Bismillahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,  
Salam Sehat, Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Buddhaya,  
Salam Kebajikan,***

**Sehat untuk Rakyat!**

***Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia***

*Setelah gelap, terbit terang  
Setelah hujan badai, muncul pelangi  
Setelah pandemi, saatnya transformasi*

***Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI yang kami hormati,***

Pencabutan status Pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi menandai keberhasilan Indonesia melewati krisis kesehatan terbesar abad ini.

Masih lekat di ingatan kita bersama, 3 tahun yang lalu, ketika pandemi COVID-19 datang seperti badai yang tidak terduga, menguji ketangguhan sistem kesehatan kita.

Di tengah terjangan badai dan gelombang Pandemi COVID-19 yang tinggi, para tenaga medis, tenaga kesehatan Indonesia, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia berjuang tak kenal lelah **mempertaruhkan nyawa sendiri demi menyelamatkan nyawa sesama.**

Keterbatasan tenaga, alat kesehatan, maupun obat-obatan, tak menghentikan semangat dan dedikasi mereka bagi masyarakat **Salam hormat setinggi-tingginya bagi para pejuang kesehatan dari hati saya yang terdalam.**

Pandemi COVID-19 membuka mata kita akan banyaknya perbaikan yang harus dikerjakan dalam bidang kesehatan, akan transformasi yang amat diperlukan.

300,000 rakyat kita wafat karena stroke setiap tahun. 4,000 bayi wafat karena kelainan jantung bawaan. 5 juta balita hidup dalam kondisi stunting. Rakyat kita membutuhkan akses dan kualitas layanan Kesehatan yang lebih baik.

***Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI yang kami hormati,***

Sesudah badai Pandemi, inilah saatnya kita memperbaiki dan membangun kembali sistem kesehatan Indonesia, menjadi lebih tangguh dari sebelumnya untuk generasi anak-anak kita dan generasi cucu-cucu kita.

Menuju Indonesia Emas 2045, bangsa Indonesia perlu bekerja keras, sangat keras. Masa keemasan itu tidak akan tercapai tanpa manusia Indonesia yang sehat.

“Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.” Itulah amanat UUD 1945 bagi kita.

Berdasarkan amanat itulah, DPR menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

Pemerintah, Mendukung penuh RUU Kesehatan ini untuk perubahan yang lebih baik.

#### **1. Pertama,**

***Dari fokus mengobati, menjadi mencegah.***

Pemerintah sepakat dengan DPR RI, pentingnya layanan primer yang mengedepankan **layanan promotif dan preventif** berdasarkan siklus hidup. Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, Pemerintah menekankan pentingnya standardisasi jejaring layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat.

**2. Kedua,**

*Dari akses layanan kesehatan yang susah, menjadi mudah.*

Pemerintah sepakat dengan DPR RI, bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur, SDM, dan sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, serta pengembangan jejaring pengampunan layanan prioritas dan pelayanan unggulan nasional berstandar internasional.

**3. Ketiga,**

*a. Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri, menjadi mandiri di dalam negeri.*

Pemerintah sepakat dengan DPR RI, bahwa diperlukan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, prioritas penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, dan pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri.

*b. Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah, menjadi tangguh.*

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan kesiapsiagaan pra bencana dan penanggulangan secara terkoordinasi dengan melakukan penyiapan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.

**4. Ke-empat,**

*Dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan efektif.*

Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk **menerapkan penganggaran berbasis kinerja** dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan yang menjadi pedoman yang jelas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**5. Ke-lima,**

*a. Dari tenaga Kesehatan yang krang, menjadi cukup dan merata.*

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis, melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit.

*b. Dari perizinan yang rumit dan lama, menjadi cepat, mudah, dan sederhana.*

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup, dengan kualitas yang terjaga.

- c. *Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi, menjadi dilindungi.*  
Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Secara khusus, bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu.

6. Ke-enam,

- a. *Dari sistem informasi yang terfragmentasi, menjadi terintegrasi.*  
Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan integrasi berbagai Sistem Informasi Kesehatan ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang akan memudahkan setiap orang untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu.
- b. *Dari teknologi kesehatan yang tertinggal, menjadi terdepan.*  
Pemerintah sepakat dengan DPR RI perlunya akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi.

***Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI yang kami hormati,***

Transformasi kesehatan dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Ada sebelas (11) undang-undang terkait sektor kesehatan lama, dan disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman.

Pemerintah sependapat dengan DPR terkait dengan ruang lingkup dan pokok-pokok hasil pembahasan yang telah mengerucutkan berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia ke dalam 20 Bab dan 458 Pasal di RUU Kesehatan. Pemerintah juga mengapresiasi pandangan mini fraksi yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja tanggal 19 Juni 2023.

Pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka *meaningful participation* baik dalam bentuk *Forum Group Discussion* maupun seminar, yang dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dan 72.000 peserta, serta menerima setidaknya 6.011 masukan secara lisan dan tulisan maupun melalui portal *partisipasisihat*. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan,

yang telah turut menyumbangkan pemikirannya. Segala masukan yang diterima, telah dipertimbangkan dengan cermat guna penyempurnaan RUU ini.

***Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI yang kami hormati,***

Akhir kata, izinkanlah kami untuk menyampaikan harapan agar Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan ini dapat disetujui pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini.

Kita semua berada di kapal yang sama. Badai dan gelombang sudah dan akan terus terjadi, seperti yang telah kita alami saat pandemi.

Kita tidak dapat membendung badai, apalagi menenangkan lautan. Akan tetapi, kita bisa memegang kemudi kuat-kuat, dengan RUU Kesehatan sebagai kompas transformasi, kita berlayar menuju arah yang sama: **menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Dengan disahkannya RUU Kesehatan, kiranya menjadi **awal yang baru** untuk kita membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan, maupun kepulauan.

Saya ingin mengajak seluruh elemen Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta, maupun, organisasi non-pemerintah, untuk ikut membangun sampai seluruh penjuru negeri.

Saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut membangun kesehatan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, demi Indonesia emas 2045.

***Mari kita sehatkan seluruh rakyat,  
dari Sabang sampai Merauke,  
dari Miangas sampai Pulau Rote***

***Mari kita singsingkan lengan baju,  
bahu membahu,  
mengangkat sauh,  
membuang beban yang tak perlu,  
membentangkan layar menuju,  
Indonesia yang Sehat***

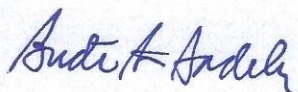
Demikianlah Pendapat Akhir Pemerintah, Pemerintah meyakini dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini, maka kita telah membentangkan layar kapal besar bangsa Indonesia ini, untuk bergerak maju, demi sebaik-baiknya kesehatan rakyat Indonesia. Kiranya ikhtiar kita semua diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,  
Salam Sehat, Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

Jakarta, 11 Juli 2023

a.n. Pemerintah

MENTERI KESEHATAN RI



BUDI GUNADI SADIKIN